

=

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akuntabilitas membutuhkan aturan, ukuran atau kriteria, sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan. Menteri dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, maka akuntabilitas adalah suatu keadaan performan para petugas yang mampu bekerja dan dapat memberikan hasil kerja sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan bersama sehingga memberikan rasa puas pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan akuntabilitas pendidikan adalah kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Sesuai Peraturan Pemerintah No 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Ini Menunjukkan bahwa Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai

=

agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Slamet (2003: 27) tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang sehingga peran akuntabilitas seorang pimpinan sekolah sangat diperlukan dalam pengelolaan bantuan dari pemerintah. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalny biaya pendidikan. disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan pemerintah pada kurun 1998-2003. BOS dimaksudkan sebagai subsidi biaya operasional sekolah kepada semua peserta didik wajib belajar, yang untuk tahun 2009 jumlahnya mencapai 26.866.992 siswa sekolah dasar, yang disalurkan melalui satuan pendidikan. Dengan Program BOS, satuan pendidikan

diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik, terutama mereka siswa yang ekonomi lemah.

Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP maupun Swasta yang ada di kecamatan Tibawa untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa Khususnya Di SDN 1 Isimu Raya. BOS ini diberikan kepada sekolah untuk dikelola secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta aspek-aspek yang sudah dibiayai BOS di sekolah ini yaitu honor guru tidak tetap, pengadaan perangkat pembelajaran, bahan habis pakai dan pembiayaan kebutuhan sekolah yang berhubungan dengan alokasi Dana BOS yang sifatnya tak terduga, dan besarnya dana yang masuk untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan data yang di ambil berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SDN 1 Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ditemukan bahwa Akuntabilitas Kepala Sekolah dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dimaksud masih sangat abstrak untuk diketahui oleh masyarakat dalam pengelolaan Dana di sekolah ini sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul “ **Akuntabilitas Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN 1 Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah

1. Akuntabilitas kepala sekolah dalam Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
2. Akuntabilitas Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
3. Akuntabilitas Kepala Sekolah dalam Evaluasi dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Sekolah dalam Perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
3. Untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Sekolah dalam Evaluasi dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah

Akan menjadi tambahan referensi terkait dengan pemahaman maupun pengetahuan tentang ketepatan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah untuk lebih baik lagi.

2. Bagi Kepala sekolah

Dapat dijadikan sebagai referensi dalam rangka ketepatan pengelolaan dana operasional sekolah untuk mendapatkan bantuan dana selanjutnya.

3. Bagi Instansi lain

Akan dapat menjadi bahan pembandingan terhadap pengelolaan dana operasional sekolah.

4. Bagi Peneliti

Akan menjadi pengalaman dan dapat menambah keilmuan bagi peneliti untuk pengelolaan dana operasional sekolah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

1. Akuntabilitas Kepala Sekolah adalah Pertanggungjawaban diri sebagai pimpinan untuk melakukan manajerial atau pengelolaan berbagai program termasuk pengalokasian dana dalam pemanfaatan anggaran yang ada di sekolah.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.
3. Kepala sekolah adalah pemimpin yang melakukan pengelolaan terhadap satuan pendidikan.